

Analisis Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Desa

Syafir Ridho Arwansyah Hapili
Universitas Bina Taruna Gorontalo
Kenhapili08@gmail.com

Ellys Rachman
Universitas Bina Taruna Gorontalo
Ellysrachman12@gmail.com

Misbahudin Djaba
Universitas Bina Taruna Gorontalo
Misbahudindjaba014@gmail.com

Submission: 04-06-2025

Revised: 20-10-2025

Accepted: 01-10-2025

Abstract

The effectiveness of implementing the duties and functions of village officials is a critical element in strengthening accountable village governance and ensuring quality public services. While prior studies have broadly examined village officials' performance, few have specifically addressed effectiveness through the indicators of work quantity, responsibility, and initiative. This study fills that gap by analyzing the implementation of these indicators in Bigo Village, Kaidipang District, North Bolaang Mongondow Regency. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed with Miles and Huberman's model. The findings reveal that effectiveness remains suboptimal: work quantity is low, responsibility is inconsistent, and initiative is limited. Theoretically, this study extends Sinambela's (2018) framework on performance effectiveness by highlighting limited initiative as the most critical barrier in village governance practices. Practically, it recommends enhancing officials' competencies through training, adopting digitalized work systems, and strengthening discipline and work ethics. The study thus contributes to the literature on public administration by contextualizing performance effectiveness in village-level governance while also offering actionable insights for improving public service delivery.

Keywords: Effectiveness, Tupoksi, Apparatus, Village

Abstrak

Efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur desa merupakan aspek fundamental dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian sebelumnya banyak menyoroti kinerja aparatur desa secara umum, namun masih jarang yang mengkaji efektivitas berdasarkan indikator kuantitas kerja, tanggung jawab, dan inisiatif kerja. Hal ini menjadi celah penelitian (research gap) yang diangkat dalam studi ini. Tujuan penelitian adalah menganalisis efektivitas pelaksanaan tupoksi aparatur desa di Desa Bigo dengan menggunakan tiga indikator tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan

dokumentasi, sedangkan analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas belum optimal, ditandai dengan rendahnya kuantitas kerja, inkonsistensi tanggung jawab, serta minimnya inisiatif kerja. Secara teoretis, temuan ini memperkuat kerangka konseptual Sinambela (2018) mengenai indikator efektivitas kinerja aparatur desa, dengan menunjukkan bahwa keterbatasan inisiatif menjadi faktor penghambat paling dominan. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan kompetensi aparatur melalui pelatihan, digitalisasi sistem kerja, serta peningkatan kedisiplinan dan etos kerja. Dengan demikian, studi ini berkontribusi pada literatur administrasi publik terkait efektivitas kinerja aparatur desa, sekaligus memberikan masukan strategis bagi peningkatan tata kelola desa.

Kata Kunci: Efektivitas, Tupoksi, Aparatur, Desa

PENDAHULUAN

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) aparatur desa merupakan kewajiban utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Menurut Widyarti et al. (2022), pelaksanaan tupoksi harus berjalan secara rutin, jelas, dan sesuai dengan unit kerja masing-masing aparatur agar program desa dapat terarah sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan. Efektivitas pelaksanaan tupoksi menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan desa, pelayanan administratif, maupun pemberdayaan masyarakat. Jika tupoksi dijalankan dengan baik, maka tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan optimal, namun sebaliknya, kelemahan dalam pelaksanaannya akan menimbulkan berbagai persoalan seperti lambannya pelayanan publik, rendahnya partisipasi masyarakat, serta ketidaktepatan sasaran program pembangunan (Lumempow et al., 2021). Efektivitas pelaksanaan tupoksi aparat desa menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan program-program desa. Jika aparat desa mampu menjalankan tugasnya dengan baik, maka berbagai program pembangunan desa, pelayanan administratif, serta pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan optimal. Sebaliknya, jika tupoksi tidak dijalankan secara efektif, maka akan timbul berbagai permasalahan seperti lambannya pelayanan publik, rendahnya partisipasi masyarakat, serta ketidaktepatan sasaran dalam perencanaan pembangunan.

Secara normatif, peran dan tanggung jawab aparatur desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa kepala desa beserta perangkatnya berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksana, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengamanatkan bahwa setiap unit penyelenggara layanan wajib memberikan pelayanan secara cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, efektivitas aparatur desa tidak hanya menjadi kebutuhan praktis, tetapi juga kewajiban hukum yang memiliki implikasi langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas. Namun, kajian tentang efektivitas aparatur desa di Indonesia masih terbatas dan cenderung berfokus pada aspek normatif atau studi kasus berskala nasional. Padahal, dalam konteks desa terpencil seperti Desa Bigo di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tantangan yang dihadapi berbeda secara signifikan dibandingkan dengan desa yang memiliki akses sumber daya lebih memadai. Di desa-desa kecil, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana teknologi informasi, serta rendahnya disiplin kerja aparatur dapat menghambat tercapainya efektivitas pelayanan publik. Gap riset inilah yang perlu diisi, karena belum banyak penelitian yang menempatkan efektivitas tupoksi aparatur desa dalam perspektif global *governance* dan kinerja organisasi publik.

Data awal memperlihatkan bahwa Desa Bigo dengan jumlah penduduk 1.063 jiwa hanya dilayani oleh 11 aparatur desa. Hasil observasi menunjukkan pelayanan administrasi kerap terlambat: misalnya, penyelesaian dokumen surat keterangan dan izin yang seharusnya selesai dalam 1 hari, rata-rata memerlukan 3–4 hari. Kondisi ini diperburuk oleh sistem kerja manual, keterlambatan kehadiran aparatur, serta kendala jaringan internet. Permasalahan tanggung jawab juga tampak dalam lambatnya respons terhadap keluhan masyarakat, sementara aspek inisiatif aparatur masih rendah karena sebagian besar pekerjaan baru dijalankan setelah ada instruksi kepala desa. Situasi ini menunjukkan adanya persoalan serius pada tiga dimensi kinerja aparatur desa: kuantitas kerja, tanggung jawab, dan inisiatif kerja. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan secara ilmiah dan praktis. Secara akademik, studi ini menawarkan kontribusi dalam memperluas penerapan teori efektivitas kinerja birokrasi publik pada konteks pemerintahan desa terpencil, sebuah area yang masih jarang disentuh dalam literatur internasional. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan disiplin kerja, memperkuat akuntabilitas, dan mendorong inisiatif aparatur agar pelayanan publik lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Efektivitas Pelaksanaan Tupoksi Aparatur Desa Di Desa Bigo Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara". Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) aparatur desa sekaligus bisa menjadi rekomendasi kebijakan untuk peningkatan pelaksanaan tupoksi aparatur desa, di desa yang jarang tersentuh oleh pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang akurat mengenai kondisi atau fenomena yang dialami. Menurut Sugiyono (dalam Abdussamad, 2021) metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menyelidiki objek dalam keadaan alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Menurut Sugiyono (dalam Abdussamad, 2021) metode penelitian kualitatif deskriptif mencakup pengumpulan data dalam bentuk kata-kata atau gambar, yang berarti tidak fokus pada angka. Data yang terkumpul akan dianalisis dan kemudian dideskripsikan agar mudah dipahami oleh orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran, menjelaskan, dan menafsirkan situasi yang ada terkait dengan inovasi peningkatan mutu pelayanan publik di Desa Bigo Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan observasi di lokasi penelitian. Informan dipilih secara terstruktur, meliputi kepala desa (1 orang), sekretaris desa (1 orang), kepala seksi pemerintahan (1 orang), kepala seksi pelayanan (1 orang), kepala urusan keuangan (1 orang), kepala urusan perencanaan (1 orang), ketua BPD (1 orang), serta masyarakat (3 orang), sehingga jumlah keseluruhan informan adalah sepuluh orang. Data sekunder diperoleh dari dokumen yang resmi, laporan instansi artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengidentifikasi secara langsung kondisi pelaksanaan tupoksi aparatur desa di desa bigo serta membandingkan dengan pernyataan informan. Wawancara mendalam dilakukan agar peneliti

memperoleh informasi langsung mengenai pengalaman, pandangan, dan evaluasi informan terhadap pelaksanaan tupoksi aparatur desa di desa bigo. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer melalui pengumpulan dokumen tertulis, laporan internal pemerintah desa, maupun data sekunder dari literatur akademik.

Analisis data dilakukan menggunakan model dari Miles dan Huberman yang dikembangkan oleh (Safarudin et al., 2023). Model ini mencakup tiga proses kegiatan yang saling berkaitan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data mencakup penyederhanaan data dengan memilih informasi yang penting dan relevan saja. Penyajian data proses ini menyusun data yang telah diringkas ke dalam bentuk yang terorganisir, seperti tabel, narasi atau bagan. Penarikan kesimpulan, di tahap ini dilakukan pencarian makna, memahami pola, serta merumuskan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis.

HASIL DAN DISKUSI

Konsep Efektivitas

Secara etimologi, kata efektivitas berasal dari kata efektif, yang dalam Bahasa Inggris “effectiveness” berarti berhasil. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti efek, pengaruh, akibat, atau mampu menghasilkan hasil. Dengan demikian, efektivitas dapat diartikan sebagai daya guna atau kesesuaian dalam suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Siagian (dalam Nurlita, 2023), efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Menurut Osborne dan Gaebler (dalam Nurlita, 2023), efisiensi merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar sumber daya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit output. Sementara itu, efektivitas lebih menekankan pada kualitas output yang dihasilkan. Dengan kata lain, efisiensi berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai suatu hasil, sedangkan efektivitas berfokus pada sejauh mana hasil tersebut benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kedua aspek ini sama-sama penting dalam menilai kinerja, khususnya pada organisasi publik. Namun, dalam praktiknya, penilaian kinerja sering kali lebih menekankan pada ukuran efisiensi semata. Padahal, efektivitas pelaksanaan program tidak kalah penting, karena berkaitan dengan sejauh mana tujuan program dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Menurut Beni (dalam Rahmat, 2022), efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan, atau dapat diartikan sebagai ukuran sejauh mana hasil, kebijakan, dan prosedur suatu organisasi dapat mencapai tujuannya. Dalam sector publik, efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu operasi dalam menyediakan layanan kepada masyarakat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Robbin (dalam Nurlita, 2023), terdapat empat pendekatan dalam mengukur efektivitas pemerintahan Desa, yaitu pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan system, pendekatan konstituensi strategis, serta pendekatan nilai-nilai bersaing. Efektivitas program dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian sasaran yang mencerminkan sejauh mana tujuan program yang telah ditetapkan berhasil diralisasikan.

Berdasarkan pandangan para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan kerja yang telah ditetapkan. Efektivitas juga selalu merujuk pada bagaimana penyelesaian tugas pemerintah sesuai dengan waktu yang telah dirancang sedari awal. Semakin banyak rencana yang tercapai, semakin tinggi juga tingkat efektivitas suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah itu sendiri.

Konsep Tugas Pokok Dan Fungsi

Secara etimologi, kata efektivitas berasal dari kata efektif, yang dalam Bahasa Inggris “effectiveness” berarti berhasil. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti efek, pengaruh, akibat, atau mampu menghasilkan hasil. Dengan demikian, efektivitas

dapat diartikan sebagai daya guna atau kesesuaian dalam suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Siagian (dalam Nurlita, 2023), efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Menurut Osborne dan Gaebler (dalam Nurlita, 2023), efisiensi merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar sumber daya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit output. Sementara itu, efektivitas lebih menekankan pada kualitas output yang dihasilkan. Dengan kata lain, efisiensi berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai suatu hasil, sedangkan efektivitas berfokus pada sejauh mana hasil tersebut benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kedua aspek ini sama-sama penting dalam menilai kinerja, khususnya pada organisasi publik. Namun, dalam praktiknya, penilaian kinerja sering kali lebih menekankan pada ukuran efisiensi semata. Padahal, efektivitas pelaksanaan program tidak kalah penting, karena berkaitan dengan sejauh mana tujuan program dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Menurut Beni (dalam Rahmat, 2022), efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan, atau dapat diartikan sebagai ukuran sejauh mana hasil, kebijakan, dan prosedur suatu organisasi dapat mencapai tujuannya. Dalam sector publik, efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu operasi dalam menyediakan layanan kepada masyarakat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Robbin (dalam Nurlita, 2023), terdapat empat pendekatan dalam mengukur efektivitas pemerintahan Desa, yaitu pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan system, pendekatan konstituensi strategis, serta pendekatan nilai-nilai bersaing. Efektivitas program dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian sasaran yang mencerminkan sejauh mana tujuan program yang telah ditetapkan berhasil diralisasikan. Berdasarkan pandangan para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan kerja yang telah ditetapkan. Efektivitas juga selalu merujuk pada bagaimana penyelesaian tugas pemerintah sesuai dengan waktu yang telah dirancang sedari awal. Semakin banyak rencana yang tercapai, semakin tinggi juga tingkat efektivitas suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah itu sendiri. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan tupoksi aparatur desa di Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Tiga aspek utama yang ditelaah adalah kuantitas kerja, tanggung jawab, serta inisiatif kerja.

Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja sangat mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh aparatur desa. Penelitian ini menemukan bahwa kuantitas kerja aparatur Desa Bigo masi belum optimal dengan adanya beberapa kendala khususnya dalam pelayanan administrasi. Hal ini berdampak langsung pada pelayanan berbasis teknologi informasi seperti, pengelolaan data dan pengurusan dokumen kependudukan. Kepala Desa Bigo menyampaikan bahwa: “ada beberapa ada beebbrapa kendala dalam kerja aparatur desa bigo seperti pada pelayanan yang kadang kala menghadapi keterlambatan karena aparatur yang membidangnya itu tidak berada di tempat” (IP, Wawancara 19 Mei 2025).

Hal serupa juga disampaikan oleh sekretaris Desa Bigo:

“saya kerap menerima laporan terkait keterlambatan dalam pelayanan. Terhadap hal tersebut saya segera memberikan teguran langsung kepada kaur maupun kasi yang bertanggung jawab” (SH, Wawancara 19 Mei 2025).

Selain itu, masyarakat juga merasakan kurangnya kuantitas kerja dari aparatur desa bigo. Salah satu masyarakat menyatakan:

“ada beberapa hambatan terhadap pengurusan administrasi di desa bigo. Contohnya keterlambatan dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta pada masalah jaringan” (DP, Wawancara 22 Mei 2025).

Dari keseluruhan wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa kuantitas kerja aparatur desa bigo masih belum optimal hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas, khususnya pada pelayanan administrasi kepada masyarakat, yang disebabkan oleh ketidak hadirannya aparatur desa yang bersangkutan serta kendala teknis pada jaringan internet.

Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah komponen yang penting untuk melihat kemampuan aparatur desa dalam mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya, mampu dalam mengambil keputusan, serta menunjukkan perilaku kerja yang konsisten setiap harinya. Temuan penelitian menemukan bahwa tanggung jawab belum sepenuhnya optimal karena masih ada keterlambatan dalam merespon keluhan masyarakat hal ini menurunkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Kepala Desa menyatakan bahwa:

“dalam hal tanggung jawab saya melihat para kepala dusun yang telah bekerja sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing. Tetapi masih terdapat beberapa aparatur desa yang dinilai kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Hal ini terlihat ketika ada masyarakat yang menyampaikan keluhan terkait pelayanan atau permasalahan administrasi, tetapi tidak segera di respon, meskipun bersifat mendesak” (IP, Wawancara 19 Mei 2025).

Pernyataan kepala desa juga di dukung dengan pernyataan dari kepala seksi pemerintahan yang menyatakan bahwa:

“seluruh aparatur desa sudah punya pembagian tugas yang jelas, termasuk para kepala dusun yang bertanggung jawab dengan tupoksinya masing-masing. Tapi terkadang pada prakteknya masih ada juga terdapat beberapa aparatur desa yang belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawab atas kerja mereka secara maksimal. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses pelayanan pada masyarakat, terutama ketika masyarakat membutuhkan kecepatan terhadap kerja-kerja dari aparatur desa” (SH, Wawancara 19 Mei 2025).

Masyarakat juga merasakan belum optimalnya tanggung jawab dari beberapa aparatur desa bigo, salah satu masyarakat menyatakan bahwa:

“yang saya lihat, terkadang aparatur desa bigo kurang serius dan lambat dalam menanggapi keluhan masyarakat, contohnya dalam pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) serta dokumen lainnya” (DP, Wawancara 22 Mei 2025).

Dari beberapa hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab aparatur desa bigo terhadap tupoksinya masing-masing masih belum optimal dikarenakan masih terdapat kendala yang menjadi perhatian utama, yakni lambatnya respons aparatur desa terhadap keluhan masyarakat yang bersifat mendesak, terutama dalam pelayanan administrasi seperti pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) serta dokumen lainnya.

Inisiatif Kerja

Kemampuan inisiatif kerja yang dimiliki aparatur desa merupakan aspek yang sangat penting sekaligus kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiatif kerja aparatur desa bigo sudah berjalan dengan baik dengan sikap proaktif dalam mendukung kelancaran tugas-tugas mereka. Namun demikian, pelaksanaan inisiatif kerja tersebut hanya sebagai inisiatif kerja pada umumnya yang sudah sering mereka lakukan tanpa ada inisiatif yang lebih inovatif lagi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa:

“saya memberikan keleluasaan kepada aparat desa untuk melaksanakan tugas secara mandiri, selama tetap berada dalam koordinator tugas pokok dan fungsi masing-masing serta tidak melampaui kewenangan kepala desa. selama aparat telah melakukan komunikasi terlebih dahulu, mereka diperbolehkan mengesekusi pekerjaan tanpa harus menunggu instruksi langsung” (IP, Wawancara 19 Mei 2025). Hal ini juga serupa dengan pernyataan dari kepala urusan perencanaan yang mengungkapkan bahwa:

“aparatur desa bigo telah menunjukkan sikap inisiatif yang baik dalam menjalankan tugas-tugas yang telah dipahami dan yang sudah menjadi bagian dari rutinitas mereka. Namun untuk kegiatan tertentu yang bersifat strategis tetap diperlukan arahan dari pimpinan agar pelaksanaannya berjalan sesuai prosedur” (JH, Wawancara 19 Mei 2025).

Salah satu masyarakat desa bigo juga menyatakan:

“pelaksanaan inisiatif oleh aparatur desa bigo harus tetap berada dalam koridor tugas pokok dan fungsi masing-masing, disertai dengan koordinasi yang baik bersama kepala desa” (FL, Wawancara 22 Mei 2025). Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa aparatur desa bigo telah menunjukkan tingkat inisiatif kerja yang cukup baik, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas rutin. Namun demikian, pelaksanaan inisiatif tersebut tetap dibatasi dan kurang diberikan ruang untuk melakukan inisiatif yang bersifat inovasi.

Analisis Data Penelitian

Fokus	Data Empirik (3 Kutipan Langsung)	Reduksi Data (<i>Open Coding</i>)	Display/Kategori (Axial)	Tema (Selective)	Kesimpulan & Verifikasi	Jawaban atas Latar Belakang
Kuantitas Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • “Kuantitas kerja aparatur desa Bigo masih belum optimal... pelayanan administrasi lambat karena ketidakhadiran aparatur serta kendala jaringan internet.” (Wawancara, 19 Mei 2025) • “Kurang nya kuantitas kerja. Terlihat dari lambatnya penyelesaian surat keterangan dan perizinan.” (Wawancara, 22 Mei 2025) • “Kuantitas kerja sebenarnya sesuai tupoksi, tapi terdapat kendala teknis & absensi aparatur ini menghambat pelayanan.” (Wawancara, 19 Mei 2025) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran aparatur rendah; • Jaringan internet lemah; • Pelayanan administrasi lambat 	<ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas; • Efisiensi kerja; • Kendala teknis & SDM 	Kuantitas kerja belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Data konsisten antar sumber (observasi, wawancara, dokumen) • Hambatan utama: absensi & fasilitas TI • Dampak: keterlambatan pelayanan dokumen publik 	Menjelaskan latar belakang masalah: lambatnya administrasi & pelayanan publik disebabkan rendahnya kuantitas kerja aparatur

Tanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • • “Secara umum aparaturnya melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi, khususnya kepala dusun yang aktif merespon masalah.” (Wawancara, 19 Mei 2025) • “Masih terdapat hambatan respons lambat terhadap keluhan masyarakat, khususnya administrasi mendesak(KT P,dll).” (Wawancara, 19 Mei 2025) • “Tanggung jawab sudah sesuai tupoksi, tapi respons terhadap keluhan sering terlambat.” (Wawancara, 19 Mei 2025) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala dusun proaktif; • Aparatur lain respons lambat; • Pengawasan BPD aktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Integritas ; • Akuntabilitas; • Responsivitas 	Tanggung jawab cukup baik, tapi respons lambat	<ul style="list-style-type: none"> • Triangulasi informan konsisten : ada kepedulian tapi eksekusi lambat • BPD berfungsi sebagai pengawas aktif • Hambatan: kecepatan respons 	Menjawab latar belakang: meski ada rasa tanggung jawab, lambatnya respons menghambat efektivitas & menurunkan kepuasan masyarakat
Inisiatif Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • • “Aparatur tidak selalu menunggu perintah atasan... proaktif menjalankan tugas rutin.” (Wawancara, 19 Mei 2025) • “Namun untuk hal strategis (keuangan, kebijakan) tetap menunggu instruksi Kepala Desa.” (Wawancara, 19 Mei 2025) 	<ul style="list-style-type: none"> • Proaktif pada tugas rutin; • Batasan pada urusan strategis ; • Harus ada koordinasi dengan kepala desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Proaktif; • Koordinasi; • Batasan kewenangan 	Inisiatif cukup baik tapi terbatas tupoksi	<ul style="list-style-type: none"> • Informan sepakat: inisiatif ada namun masih parsial • Inisiatif berjalan pada level teknis, bukan strategis • Kunci: koordinasi & izin pimpinan 	Menjawab latar belakang: rendahnya inisiatif bukan pada tugas rutin, tetapi pada kebijakan penting; masih bergantung pimpinan

-
- “Inisiatif kerja cukup baik, tapi tetap dibatasi tupoksi & koordinasi dengan pimpinan.” (Wawancara, 19 Mei 2025)
-

Analisis data yang dilakukan berdasarkan model Miles dan Huberman menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan tugas pokok aparatur desa di Desa Bigo sangat dipengaruhi oleh tiga fokus utama, yakni kuantitas kerja, tanggung jawab, dan inisiatif kerja. Kuantitas kerja aparatur terlihat dari sejauh mana mereka hadir dan mampu menyelesaikan administrasi tepat waktu. Meskipun terdapat upaya untuk menjalankan pelayanan sesuai tupoksi, namun dalam praktiknya masih dijumpai keterlambatan akibat rendahnya tingkat kehadiran aparatur serta kendala teknis berupa jaringan internet yang lemah. Kondisi ini berdampak pada lambatnya pelayanan administrasi, khususnya dalam penyelesaian surat keterangan dan perizinan, sehingga produktivitas dan efisiensi kerja aparatur desa belum sepenuhnya optimal.

Faktor tanggung jawab aparatur juga berperan penting dalam memastikan kelancaran pelayanan publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum tanggung jawab telah dijalankan sesuai tupoksi, khususnya oleh kepala dusun yang proaktif merespon permasalahan warga. Namun demikian, hambatan masih terlihat pada aparatur lain yang cenderung lambat dalam merespons keluhan masyarakat, terutama yang bersifat mendesak seperti dokumen administrasi kependudukan. Walaupun terdapat dukungan pengawasan dari BPD yang berfungsi aktif, keterlambatan dalam eksekusi tetap menurunkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur. Dengan demikian, rasa tanggung jawab sudah ada, tetapi belum sepenuhnya tercermin dalam kecepatan dan kualitas pelayanan.

Dari sisi inisiatif kerja, analisis memperlihatkan bahwa aparatur desa tidak selalu menunggu perintah atasan dalam melaksanakan tugas rutin. Mereka cukup proaktif dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari sesuai tupoksi. Namun, inisiatif ini masih terbatas pada lingkup teknis, sementara untuk urusan strategis seperti keuangan dan kebijakan tetap menunggu instruksi dari Kepala Desa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aparatur memiliki inisiatif, pelaksanaannya masih parsial dan sangat bergantung pada koordinasi serta persetujuan pimpinan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kinerja aparatur desa Bigo belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, sehingga perlu perbaikan menyeluruh baik dari aspek peningkatan kuantitas kerja, penguatan rasa tanggung jawab, maupun pengembangan inisiatif kerja yang lebih mandiri dan strategis.

Pembahasan

Kuantitas Kinerja

Dalam konteks ini (Agustiansyah, 2024). Menyebutkan bahwa kuantitas kerja mencerminkan seberapa banyak tugas atau jenis pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu tertentu, sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif sesuai dengan target ataupun tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Hal ini juga didukung dengan teori dari Sinambela (dalam Nurlita, 2023) yang menjelaskan bahwa kuantitas kerja menunjukkan seberapa proaktifnya pegawai di suatu organisasi dalam melakukan pengefisienan dan pengefektifan terhadap melakukan banyaknya jumlah pekerjaan dalam satu waktu, serta dapat memberikan kepuasan terhadap hasil pekerjaannya. Namun temuan di lapangan menunjukkan

bahwa meskipun aparaturnya Desa Bigo telah melaksanakan tugas mereka sesuai dengan tupoksinya masing-masing, akan tetapi masih terdapat kendala yang menyebabkan adanya keterlambatan terhadap proses pelayanan kepada masyarakat. Maka diperlukan upaya yang signifikan untuk memperkuat lagi produktivitas pegawai dalam menyelesaikan berbagai tugas yang ada terutama tugas yang bersifat urgen, guna mewujudkan keefektifan pelaksanaan tupoksi aparaturnya Desa Bigo.

Tanggung Jawab

Dalam teori yang dikemukakan oleh (Agustiansyah, 2024) bahwa tanggung jawab menggambarkan sejauh mana seorang pegawai mampu menerima dan menjelaskan tugas yang diberikan, bertanggung jawab penuh atas seluruh pekerjaannya, serta menunjukkan sikap kerja yang konsisten dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini juga sejalan dengan teori dari Sumardjono (dalam Zaitun et al., 2025) yang menyatakan bahwa tanggung jawab memiliki peran penting dalam menunjang tugas sehari-hari para pegawai. Rasa tanggung jawab ini tercermin dari sikap memiliki terhadap pekerjaan yang menjadi amanah mereka. Ketika pegawai benar-benar merasa bertanggung jawab, mereka akan bekerja dengan lebih hati-hati dan serius. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan performa kerja secara individu, tetapi juga pada kualitas pelayanan yang diberikan. Namun berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa pelaksanaan tanggung jawab atas kerja aparaturnya Desa Bigo belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih bersifat kurang profesional dalam menanggapi masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat. Para aparaturnya Desa Bigo perlu meningkatkan rasa kepedulian serta kesadaran terhadap kecepatan dan ketepatan dalam merespon keluhan dari masyarakat.

Inisiatif Kerja

Menurut Sinambela (dalam Nurlita, 2023) inisiatif kerja muncul ketika seseorang dalam sebuah organisasi secara sukarela menjalankan tugasnya tanpa harus selalu menunggu arahan dari atasan. Hal ini mencerminkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang memang sudah menjadi bagian dari kewajibannya. Salah satu ciri utama dari sikap ini adalah kemandirian dalam menyelesaikan tugas, yang menunjukkan bahwa individu mampu mengambil langkah secara mandiri demi kelancaran pekerjaan. Ini juga sejalan dengan teori dari (Safitri & Marselina, 2024) yang menjelaskan bahwa, inisiatif kerja mencerminkan kemampuan pegawai untuk secara mandiri mengambil tindakan dan menciptakan hal-hal baru yang dapat mendukung keberhasilan pekerjaannya. Sikap ini menunjukkan daya pikir, kreativitas, dan keberanian dalam mengemukakan ide, solusi, serta langkah yang akan di ambil dalam pekerjaan tanpa harus menunggu instruksi. inisiatif kerja juga menggambarkan kemampuan individu untuk bertindak secara mandiri, tanpa harus menunggu perintah atau arahan dari atasan. Pegawai yang memiliki inisiatif kerja cenderung menunjukkan pemikiran yang aktif, ide-ide kreatif dan keberanian dalam mengambil keputusan maupun langkah kongkret dalam pelaksanaan tugas demi mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hasil temuan di lapangan inisiatif kerja aparaturnya desa bigo masih kurang kreatif dan juga masih dibatasi. Pimpinan perlu memberikan ruang bagi aparaturnya desa untuk berkreasi dan mengambil keputusan dalam batas kewenangan yang jelas. Selain itu, juga penting memberikan penghargaan atau apresiasi terhadap aparaturnya yang menunjukkan sikap inisiatif kerja yang tinggi, baik secara formal maupun informal, agar mereka merasa dihargai dan termotivasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka selanjutnya dilakukan simpulan, diantaranya; *Pertama*, penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi (tupoksi) aparatur Desa Bigo Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan tupoksi telah berjalan sesuai peran dasar masing-masing aparatur, masih terdapat tantangan dalam aspek kuantitas kerja, tanggung jawab, serta inisiatif kerja. Temuan ini memperlihatkan kontribusi ilmiah berupa penguatan perspektif bahwa efektivitas aparatur desa tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan pada aturan formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor disiplin kerja, kesiapan infrastruktur pendukung, serta budaya kerja proaktif. Hal ini menjadi novelty penelitian karena masih terbatas kajian yang secara spesifik menelaah efektivitas tupoksi apratur desa dengan fokus pada indikator kuantitas kerja, tanggung jawab, dan inisiatif kerja dalam konteks pelayanan publik perdesaan.

Kedua, penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup analisis yang hanya berfokus pada satu lokasi penelitian, yakni Desa Bigo, dengan jumlah informan yang relatif terbatas, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati. Selain itu, faktor eksternal seperti dukungan teknologi informasi, kapasitas kebijakan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat belum sepenuhnya dieksplorasi secara mendalam, padahal variabel-variabel tersebut berpotensi besar memengaruhi efektivitas kinerja aparatur desa.

Ketiga, agenda penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan adalah memperluas kajian pada desa-desa lain di wilayah Bolaang Mongondow Utara atau bahkan pada skala kabupaten/kota untuk melihat pola kesamaan dan perbedaan efektivitas pelaksanaan tupoksi aparatur desa. Selain itu, penelitian ke depan dapat diarahkan pada pengembangan model peningkatan kapasitas aparatur berbasis pelatihan digital, integrasi sistem informasi desa untuk pelayanan publik, serta mekanisme pengawasan partisipatif masyarakat guna menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); cetakan pe). CV. Syakir Media Press.
- Agustiansyah, F. (2024). Literature Review: Peran Motivasi dan Kepuasan Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan. *Jurnal Interdisipliner Indonesia*, 1(01), 11–16.
- Hulu, F., & Zagoto, H. (2022). Analisis Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Aparatur Pemerintahan Desa Idala Jaya Kecamatan Maniamolo. *Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 57–65.
- Lumempow, V., Posumah, J. H., & Kolondam, H. F. (2021). Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi (Studi di Desa Kotamenara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan). *Jap*, VII(103), 38–49.
- Nurlita, S. (2023). Efektivitas Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Visi Misi Kepala Desa Di Desa Jaya Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *JUHANPERAK*, 4(1), 1167–1186.
- Safitri, D., & Marselina, R. D. (2024). Analisis Disiplin Kerja Pegawai di Kantor Desa Cikande Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat. *Journal of Education Research*, 5(1), 994–1001.
- Widyarti, C., Mustakim, S., & . A. (2022). EFEKTIFITAS TUGAS POKOK FUNGSI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI. *Dikombis: Jurnal Dinamika Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 1(1), 177–186. <https://doi.org/10.24967/dikombis.v1i2.1798>
- Zaitun, C., Jannah, M., & Muzfah, W. (2025). Pengaruh Kempotensi, Kepemimpinan, Motivasi dan Tanggung Jawab Terhadap Kinerja Pegawai Pada Puskesmas Banggai Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(6).
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); cetakan pe). CV. Syakir Media Press.

- Agustiansyah, F. (2024). Literature Review: Peran Motivasi dan Kepuasan Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan. *Jurnal Interdisipliner Indonesia*, 1(01), 11–16.
- Hulu, F., & Zagoto, H. (2022). Analisis Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Aparatur Pemerintahan Desa Idala Jaya Kecamatan Maniamolo. *Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 57–65.
- Lumempow, V., Posumah, J. H., & Kolondam, H. F. (2021). Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi (Studi di Desa Kotamenara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan). *Jap*, VII(103), 38–49.
- Nurlita, S. (2023). Efektivitas Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Visi Misi Kepala Desa Di Desa Jaya Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *JUHANPERAK*, 4(1), 1167–1186.
- Safitri, D., & Marselina, R. D. (2024). Analisis Disiplin Kerja Pegawai di Kantor Desa Cikande Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat. *Journal of Education Research*, 5(1), 994–1001.
- Widyarti, C., Mustakim, S., & . A. (2022). EFEKTIFITAS TUGAS POKOK FUNGSI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI. *Dikombis: Jurnal Dinamika Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 1(1), 177–186. <https://doi.org/10.24967/dikombis.v1i2.1798>
- Zaitun, C., Jannah, M., & Muzfah, W. (2025). Pengaruh Kempotensi, Kepemimpinan, Motivasi dan Tanggung Jawab Terhadap Kinerja Pegawai Pada Puskesmas Banggai Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(6).